



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWANKABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/78/Kep./413.114/2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemmbangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor
10);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025;

KETIGA : Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026;

KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- Bab I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi,
perubahan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan
perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
- BAB V. PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN

SHOFIAH NURHAYATI, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720420 199602 2 001



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomor 18 Lamongan

Telepon. (0322) 321 030, Fax. (0322) 312264

E-Mail : dpkh@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/dpkh



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perubahan merupakan suatu Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, dan ini merupakan bagian dari Rencana Strategis PD maupun Rencana Kerja PD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan PD merupakan adalah suatu Dokumen Perencanaan Tahunan dan Kegiatan Pembangunan yang memberikan Arah Kebijakan Strategi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja PD Perubahan Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan disusun sebagai Arah dan Pedoman bagi Unit kerja terkait dengan harapan, Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan Tujian dan Fungsi Dinas.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja OPD Perubahan Tahun 2025 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 24 April 2025

Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Lamongan



SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSI.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720420 199602 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025.....	8
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	18
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	19
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD.....	20
BAB IV PENUTUP.....	28
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	28
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Selain itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dalam hal ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian dan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan.

Disamping itu, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) yang diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan khususnya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam mengevaluasi pelaksanaan



program dan kegiatan tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan serta mengukur pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2025, disusun atas dasar:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang, Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklaturperencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20).
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten



Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 adalah :



1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2025 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
6. Acuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan dalam pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selama tahun 2025.
8. Acuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan`

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan TW I Tahun 2025.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB IV Penutup



BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan serta untuk mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun 2024 total anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 11.785.438.925,16 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 7 program, 22 Kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.434.665.208,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 20,66%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Tribulan II secara ringkas sebagai berikut :

Tabel.2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tribulan 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPO		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya manajemen internal PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal	80,49	37.135.710.125	88,76	33.703.427.225,00	79,99	9.700.186.625,16	0,00	2.430.364.208	0,00%	25,05%	88,76	36.133.791.433	110,27%	97,30%	DPKH
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	100%	801.834.642	100%	295.509.830	100%	102.938.200,00	15,00%	0	15,00%	0,00%	115%	295.509.830	115%	36,85%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	561.284.250	6 Dokumen	196.077.460	2 Dokumen	33.440.000,00	1 dokumen	0	50,00%	0,00%	7 Dokumen	196.077.460	70,00%	34,93%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	240.550.392	15 Laporan	99.432.370	5 Laporan	69.498.200,00	1 laporan	0	50,00%	0,00%	16 Laporan	99.432.370	64,00%	41,34%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Terlaksana	100%	29.349.775.473	100%	28.462.634.714	100%	8.425.850.975	20%	2.194.149.154	20,00%	26,04%	120%	30.656.783.868	120%	104,45%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	29.199.775.473	65 Orang/bulan	28.398.003.774	65 Orang/bulan	8.412.494.175,16	65 Orang/bulan	2.194.149.154	100,00%	26,08%	65 Orang/bulan	30.592.152.928	100,00%	104,77%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	15 Laporan	75.000.000	9 Laporan	29.883.900	3 Laporan	6.678.400	0	0,00%	0,00%	9 Laporan	29.883.900	60,00%	39,85%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	75.000.000	36 Laporan	34.747.040	12 Laporan	6.678.400	3 laporan	0	25,00%	0,00%	39 Laporan	34.747.040	65,00%	46,33%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Terlaksana	100%	436.292.379	100%	135.564.400	0%	0%	0%	0	0,00%	0,00%	100%	135.564.400	100%	31,07%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	233 Paket	104.710.171	90 Paket	47.640.000	-	0	0	0,00%	0,00%	90 Paket	47.640.000	38,63%	45,50%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Pegawai	331.582.208	2 Pegawai	87.924.400	-	0	0	0,00%	0,00%	2 Pegawai	87.924.400	1,33%	26,52%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor Tersedia	100%	981.943.212	100%	660.247.938	100%	167.289.700,00	15%	29.270.152	15,00%	17,50%	115%	689.518.090	115%	70,22%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	121.045.651	42 Paket	53.361.700	14 Paket	10.000.000	2 paket	1.987.700	14,29%	19,88%	44 Paket	55.349.400	62,86%	45,73%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0	6 Paket	5.350.000	2 Paket	20.728.300	0	0,00%	0,00%	6 Paket	5.350.000	60,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	81.837.238	60 Paket	60.779.400	20 Paket	18.098.000	3 paket	3.720.600	15,00%	20,56%	63 Paket	64.500.000	63,00%	78,81%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	203.233.128	180 Paket	153.648.500	60 Paket	59.657.900	10 paket	4.800.000	16,67%	8,05%	190 Paket	158.448.500	63,33%	77,96%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket	203.233.128	27 Paket	136.341.250	9 Paket	22.495.800	3 paket	14.971.852	33,33%	66,55%	30 Paket	151.313.102	66,67%	74,45%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	169.360.940	18 Dokumen	75.241.632	6 Dokumen	14.285.700	1 dokumen	3.790.000	16,67%	26,53%	19 Dokumen	79.031.632	63,33%	46,66%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	203.233.128	36 Laporan	175.525.456	12 Laporan	22.024.000	0	0,00%	0,00%	36 Laporan	175.525.456	60,00%	86,37%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Tersedia	100%	226.400.369	100%	149.526.700	100%	42.831.750	0%	0	0,00%	0,00%	100%	149.526.700	100%	66,05%	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Paket	-	1 Paket	7.650.000	-	13.872.000	0	0,00%	0,00%	1 Paket	7.650.000	1,33%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	226.400.369	1 Unit	141.876.700	1 Unit	28.959.750	0	0,00%	0,00%	1 Unit	141.876.700	2,22%	62,67%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Tersedia	100%	4.264.062.294	100%	3.226.908.536	100%	774.374.000,00	20%	195.114.902	20,00%	25,20%	120%	3.422.023.438	120%	80,25%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.210.888.598	36 Laporan	975.517.910	12 Laporan	284.438.000	2 laporan	58.997.152	16,67%	20,74%	38 Laporan	1.034.515.062	63,33%	85,43%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	3.053.173.696	36 Laporan	2.251.390.626	12 Laporan	489.936.000	3 laporan	136.117.750	25,00%	27,78%	39 Laporan	2.387.508.376	65,00%	78,20%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tribunal 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPO		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	1.075.401.756	100%	773.035.107	100%	186.902.000,00	3%	11.830.000	2,82%	6,33%	103%	784.865.107	103%	72,98%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	161.310.263	1 Unit	152.915.400	1 Unit	39.403.600		5.700.000	0,00%	14,47%	1 Unit	158.615.400	100,00%	98,33%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215.080.351	7 Unit	127.105.100	7 Unit	57.498.400	1 unit	6.130.000	14,29%	10,66%	8 Unit	133.235.100	114,29%	61,95%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	107.540.176	62 Unit	36.794.000	62 Unit	5.000.000		0	0,00%	0,00%	62 Unit	36.794.000	100,00%	34,21%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	591.470.966	1 Unit	456.220.607	1 Unit	85.000.000		0	0,00%	0,00%	1 Unit	456.220.607	100,00%	77,13%	
2	Meningkatnya Populasi Ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Sarana Peternakan Dalam Kondisi Baik	30,00%	11.885.984.957	20,00%	4.940.641.090	25,00%	923.440.400	6,00%	1.400.000	24,00%	0,15%	26,00%	4.942.041.090	86,67%	41,58%	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	21,13%	471.666.070	12,68%	191.873.250	16,90%	65.720.000	4%	1.400.000	24,85%	2,13%	16,88%	193.273.250	80%	40,98%	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	50 Laporan	471.666.070	10 Laporan	191.873.250	10 Laporan	65.720.000	2 laporan	1.400.000	20,00%	2,13%	12 laporan	193.273.250	24,00%	40,98%	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Nilai SC (Service per Conception)	1,69	353.749.552	1,71	521.681.250	1,71	174.886.000	0%	0	0,00%	0,00%	1,71	521.681.250	101%	147,47%	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	353.749.552	3 Dokumen	602.098.250	1 Dokumen	174.886.000		0	0,00%	0,00%	3 Dokumen	602.098.250	60,00%	170,20%	
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Prosentase Kios Obat Hewan yang Diawasi dan Dievaluasi	78%	235.833.035	59%	93.393.640	69%	4.190.000	0%	0	0,00%	0,00%	59%	93.393.640	76%	39,60%	
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	60 Laporan	235.833.035	36 Laporan	93.393.640	12 Laporan	4.190.000		0	0,00%	0,00%	36 Laporan	93.393.640	20,00%	39,60%	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Bibit Ternak Besar yang Diawasi Prosentase Peningkatan Bibit Ternak Kecil yang Diawasi	0,06% 0,26%	8.702.238.987	0,045% 0,180%	2.705.063.650	0,054% 0,220%	506.057.500	0% 0%	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,045% 0,180%	2.705.063.650	75% 69%	31,08%	
		Pengawasan Produksi Bibit/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Bibit/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 Laporan	870.223.899	30 Laporan	61.582.450	10 Laporan	25.150.000		0	0,00%	0,00%	30 Laporan	61.582.450	60,00%	7,08%	
		Pengendalian Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	20 Laporan	7.832.015.088	12 Laporan	2.648.583.200	4 Laporan	480.907.500		0	0,00%	0,00%	12 Laporan	2.648.583.200	60,00%	33,82%	
		Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase Luasan Tanam HPT	5,65%	2.122.497.313	4,76%	1.428.629.300	5,65%	172.586.900	0%	0	0,00%	0,00%	4,76%	1.428.629.300	84,25%	67,31%	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.341.380 Ton	2.122.497.313	804.828 Ton	1.428.629.300	268.276 Ton	172.586.900		0	0,00%	0,00%	808.828 Ton	1.428.629.300	60,00%	67,31%	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	85,71%	10.494.570.053	89,29%	15.715.156.927	71,43%	117.576.800	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,29%	15.715.156.927	104,18%	149,75%	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian tersedia	38 Unit	10.494.570.053	30 Unit	21.569.411.534	34 unit	117.576.800	0%	0	0,00%	0,00%	30 unit	21.569.411.534	78,95%	205,53%	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	3.000.000.000	9 Unit	5.549.247.950	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	9 Unit	5.549.247.950	60,00%	184,97%	
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	45 Unit	2.494.570.053	27 Unit	9.749.652.904	9 Unit	100.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	27 Unit	9.749.652.904	60,00%	390,84%	
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	5.000.000.000	3 Unit	6.270.510.680	1 Unit	17.576.800	0	0,00%	0,00%	0,00%	3 Unit	6.270.510.680	100,00%	125,41%	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Ternak Ruminansia yang Terlayani	14,27%	2.311.163.742	6,48%	4.436.957.895	12,70%	797.283.400	1,57%	1.501.000	12,36%	0,19%	8,05%	4.438.458.895	56,41%	192,04%	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ternak yang Ditangani	48,00%	471.666.070	22,00%	244.570.420	33,00%	24.475.400	0%	0	0,00%	0,00%	22%	244.570.420	45,83%	51,85%	
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	135 laporan	471.666.070	81 Laporan	244.570.420	27 Laporan	24.475.400	0	0,00%	0,00%	0,00%	81 Laporan	244.570.420	20,00%	51,85%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tribunal 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPO		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5*100%		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Keluar Masuk Ternak yang Dikeluarkan	660 surat	165.083.124	345 Surat	84.712.500	110 Surat	5.694.500	0%	0	0,00%	0,00%	345 Surat	84.712.500	52,27%	51,32%	
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	165.083.124	60 Laporan	84.712.500	20 Laporan	5.694.500	0	0,00%	0,00%	60 Laporan	84.712.500	20,00%	51,32%		
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dilaksanakan	77,00%	825.415.623	46,00%	2.679.859.815	61,00%	670.322.400	0%	0	0,00%	0,00%	46%	2.679.859.815	59,74%	324,67%	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	30 Laporan	160.000.000	18 Laporan	62.534.170	6 Laporan	7.189.800	0	0,00%	0,00%	18 Laporan	62.534.170	20,00%	39,08%		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20 Laporan	665.415.623	12 Laporan	3.031.661.455	4 Laporan	663.132.600	0	0,00%	0,00%	12 Laporan	3.031.661.455	20,00%	455,60%		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina dan Diawasi	21,50%	613.165.890	19,86%	923.078.150	19,50%	91.715.200	4%	1.347.400	20,51%	1,47%	23,86%	924.425.550	110,98%	150,76%	
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	20 Dokumen	122.633.178	12 Dokumen	243.173.100	4 Dokumen	7.070.400	1 dokumen	230.400	25,00%	3,26%	13 Dokumen	243.403.500	65,00%	198,48%	
		Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	5 Unit Usaha	306.582.945	3 Unit Usaha	193.876.000	1 Unit Usaha	35.216.500		1.117.000	0,00%	3,17%	3 Unit Usaha	194.993.000	60,00%	63,60%	
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	250 Orang	183.949.767	150 Orang	486.446.700	50 Orang	49.428.300	0	0,00%	0,00%	150 Orang	486.446.700	60,00%	264,45%		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan	10,60%	235.833.035	10,20%	89.983.550	10,40%	5.075.900	0%	153.600	0,00%	3,03%	10,20%	90.137.150	96,2%	38,22%	
		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	5 Unit	235.833.035	3 Unit	89.983.550	1 Unit	5.075.900		153.600	0,00%	3,03%	3 Unit	90.137.150	60,00%	38,22%	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Ternak Betina Peserta AUTSK	16,28%	282.999.642	12,89%	120.382.080	14,50%	18.320.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	12,89%	120.382.080	79,18%	42,54%	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Peserta AUTSK	1.100 ekor	282.999.642	800 Ekor	120.382.080	1.000 ekor	18.320.000	0%	0	0,00%	0,00%	800 Ekor	120.382.080	72,73%	42,54%	
		Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	5 Laporan	282.999.642	3 Laporan	120.382.080	1 Laporan	18.320.000	0	0,00%	0,00%	3 Laporan	120.382.080	60,00%	42,54%		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Legalitas Usaha Peternakan	0,0564%	184.466.375	0,03%	64.877.620	0,0454%	21.532.700	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	64.877.620	60,99%	35,17%	
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Budidaya yang Terdata	485 Peternak	165.083.124	900 Peternak	54.993.720	485 Peternak	12.270.000	0%	0	0,00%	0,00%	900 peternak	54.993.720	185,57%	33,31%	
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	5 Laporan	165.083.124	3 Laporan	54.993.720	1 Laporan	12.270.000	0	0,00%	0,00%	3 Laporan	54.993.720	60,00%	33,31%		
		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan	8 Surat	19.383.251	6 Surat	9.883.900	6 surat	9.262.700	0%	0	0,00%	0,00%	6 Surat	9.883.900	75,00%	50,99%	
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	5 Laporan	19.383.251	3 Laporan	9.883.900	1 Laporan	9.262.700		0	0,00%	0,00%	3 Laporan	9.883.900	60,00%	50,99%	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	3,68%	1.185.572.758	2,63%	1.403.468.620	3,16%	207.099.000	0,00%	1.400.000	0,00%	0,68%	2,63%	1.404.868.620	71,47%	118,50%	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok temak yang meningkat kelasnya	2 Kelompok	1.185.572.758	2 Kelompok	1.403.468.620	2 Kelompok	207.099.000	0%	1.400.000	0,00%	0,68%	2 kelompok	1.404.868.620	100%	118,50%	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Unit	296.393.190	30 Unit	347.443.800	10 Unit	16.960.000	0	0,00%	0,00%	30 Unit	347.443.800	60,00%	117,22%		
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	118.557.276	3 Unit	151.724.320	1 Unit	96.800.000	0	0,00%	0,00%	3 Unit	151.724.320	60,00%	127,98%		
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	15 Unit	770.622.293	9 Unit	904.300.500	3 Unit	93.339.000		1.400.000	0,00%	1,50%	9 Unit	905.700.500	60,00%	117,53%	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan dapat diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak Besar			2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	-17,98%	-15,60%	%	2,75%	
2	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak Kecil			1,50%	2,25%	3,00%	3,75%	-2,32%	5,64%	%	6,5%	
3	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak Unggas			3,00%	4,50%	6,00%	7,50%	34,86%	24,36%	%	26,00%	
4	Indeks Harga Yang Diterima Peternak			142,85	142,95	143,05	143,15	120,06	119,61	%	120,50	
5	Nilai SAKIP OPD			86,74	86,79	86,84	86,89	88,06	88,07	88,08	88,20	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan perlu melakukan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan, penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan perizinan dan pelayanan pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan (DPKH) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan., yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pembinaan pelayanan umum bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, dan urusan Pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. penyelenggaraan Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. pembinaan Administrasi Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dan lingkungan usaha peternakan.
2. Belum optimalnya pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
3. Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU) untuk penjaminan ketersediaan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
4. Mendorong peningkatan kualitas, kuantitas dan diversifikasi olahan produk hewan yang tersertifikasi.
5. Optimalisasi penyediaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) teknis peternakan.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peran serta dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan perubahan rencana kerja dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rapat forum PD/Gabungan PD, serta kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bapelitbangda Kabupaten Lamongan dan diadakan di setiap kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Musrenbang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah khususnya Peternakan dan Kesehatan Hewan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya. Musrenbang juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan Masyarakat serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Telaah terhadap Perubahan Renja Tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Jenis Usulan	Besaran / Volume	Catatan
1.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Sukoanyar Kec. Turi	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	
2.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Payaman Kec. Solokuro	Bantuan Ternak Sapi Bakalan cross Hasil IB	1 Kelompok	
3.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Weduni Kec. Deket	Pelatihan pengolahan non pangan	1 Kelompok	
4.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Takerharjo Kec. Solokuro	Bantuan Ternak Kambing Kacang	1 Kelompok	
5.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Kranji Kec. Paciran	Bantuan Ternak Kambing PE (Peranakan Etawa)	1 Kelompok	
6.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Payaman Kec. Solokuro	Bantuan Ternak Domba	1 Kelompok	
7.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Sekaran Kecamatan Sekaran	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	
8.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Ngayung Kec. Maduran	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	



9.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Payaman Kec. Solokuro	Bantuan Ternak Sapi	1 Kelompok	
10.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Tenggulun Kec. Solokuro	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	
11.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Labuhan Kec. Brondong	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	
12.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Desa Dagan Kec. Solokuro	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	
13.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ds. Drujugurit Kec. Ngimbang	Hibah uang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)	1 Kelompok	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Tema RKP 2025 yaitu “AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”, Adapun tema pembangunan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 adalah “PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA UNTU Mendukung TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN” Sejalan dengan tema RKP dan RKPD Provinsi maka tema pembangunan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2025 adalah “MENINGKATKAN STABILITAS SOSIAL EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI SEKTOR UNGGULAN MELALUI PERLUASAN PASAR DAN DAYA SAING REGIONAL”.

Dengan tema RKPD tersebut terdapat enam fokus utama pembangunan Kabupaten Lamongan. Keenam program prioritas yang menjadi rancangan awal pembangunan tersebut adalah:

1. Peningkatan Stabilitas dan Kondusifitas Sosial;
2. Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja yang Berdaya Saing Berskala Regional;
3. Pemutakhiran Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi yang adil dan merata;
4. Stabilisasi dan Pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik dan infrastruktur dasar serta optimalisasi infrastruktur Kawasan Industri Baru dan Realisasi Ringroad Utara;
5. Penguatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Komoditas Unggulan, UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik, dan;
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2025 dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten



Lamongan yaitu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang pertanian dan tugas pembantuan, maka dukungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam pencapaian arah kebijakan nasional tahun 2025 adalah mendukung Prioritas Kabupaten nomor 5 yakni “Penguatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Komoditas Unggulan, UMKM Dan Kemudahan Akses Terhadap Pasar Elektronik Maupun Non Elektronik”.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2022-2026 adalah:

Tujuan :

“Meningkatnya Produksi Ternak dan Kesejahteraan Peternak “

Indikator :

- a. Prosentase peningkatan produksi daging*
- b. Prosentase peningkatan produksi telur*
- c. Peningkatan NTP Peternakan*

Sasaran :

- a. Meningkatnya Populasi Ternak***
- b. Meningkatnya Pendapatan Peternak***

Indikator :

- a. Prosentase peningkatan populasi ternak besar*
- b. Prosentase peningkatan populasi ternak kecil*
- c. Prosentase peningkatan populasi ternak unggas*
- d. Indeks harga yang diterima peternak*

Pada penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut



di atas tidak mengalami perubahan, Perubahan yang terjadi pada penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 hanya pada pagu anggarannya.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan;
2. Lokasi;
3. Jumlah anggaran.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2024 untuk OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terdiri dari 7 program, 22 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2024 hanya pada beserta pagu anggarannya. Total pagu indikatif/kebutuhan dana dalam Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 11.785.438.925,16 turun sebesar 31,19% atau Rp. 5.341.758.072,84 dari Renja tahun 2025 sebesar Rp. 17.127.196.998,00 yang secara rinci bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal	79,99	8.482.921.998,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal	79,99	9.700.186.625,16	1.217.264.627,16		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	100%	65.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	100%	102.938.200,00	37.938.200,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.440.000,00	18.440.000,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	69.498.200,00	19.498.200,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Terlaksana	100%	7.378.913.798,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Terlaksana	100%	8.425.850.975,16	1.046.937.177,16		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.368.913.798,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	8.412.494.175,16	1.043.580.377,16		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	6.678.400,00	1.678.400,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eranan SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12 Laporan	6.678.400,00	1.678.400,00		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Terlaksana	-	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Terlaksana	-	0,00	0,00		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00	0,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00	0,00		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor Tersedia	100%	118.777.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kantor Tersedia	100%	167.289.700,00	48.512.700,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	10.000.000,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.728.300,00	20.728.300,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	18.098.000,00	-1.902.000,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	32.737.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	59.657.900,00	26.920.900,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	15.372.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	22.495.800,00	7.123.800,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	10.620.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	14.285.700,00	3.665.700,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.048.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	22.024.000,00	-8.024.000,00		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Tersedia	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Tersedia	-	42.831.750,00	42.831.750,00		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	0,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	0,00		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	13.872.000,00	13.872.000,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	28.959.750,00	28.959.750,00		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Tersedia	100%	810.134.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Tersedia	100%	774.374.000,00	-35.760.000,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	284.438.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	284.438.000,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	525.696.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	489.936.000,00	-35.760.000,00		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	110.097.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	186.902.000,00	76.804.800,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.403.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.403.600,00	0,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	35.693.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	57.498.400,00	21.804.800,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	5.000.000,00	0,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000,00	55.000.000,00		
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Sarana Pernakan Dalam Kondisi Baik	25,00%	705.250.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Sarana Pernakan Dalam Kondisi Baik	25,00%	1.323.440.400,00	618.190.400,00		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pernakan	16,90%	20.000.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pernakan	16,90%	65.720.000,00	45.720.000,00		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Laporan	20.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Laporan	65.720.000,00	45.720.000,00		
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Nilai SC (Service per Conception)	1,7	115.000.000,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Nilai SC (Service per Conception)	1,7	174.886.000,00	59.886.000,00		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	115.000.000,00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	174.886.000,00	59.886.000,00		
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkembangan Produsen mini Feedmill	-	0,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkembangan Produsen mini Feedmill	-	0,00	0,00		
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	0,00	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	0,00	0,00		
4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Prosentase Kios Obat Hewan yang Diawasi dan Dievaluasi	69,00%	10.000.000,00	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Prosentase Kios Obat Hewan yang Diawasi dan Dievaluasi	69,00%	4.190.000,00	-5.810.000,00		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	10.000.000,00	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	4.190.000,00	-5.810.000,00		
5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Bibit Ternak Besar yang Diawasi Prosentase Peningkatan Bibit Ternak Kecil yang Diawasi	0,054% 0,22%	476.750.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Bibit Ternak Besar yang Diawasi Prosentase Peningkatan Bibit Ternak Kecil yang Diawasi	0,054% 0,22%	906.057.500,00	429.307.500,00		
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	10 Laporan	10.000.000,00	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	10 Laporan	25.150.000,00	15.150.000,00		
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	4 Laporan	466.750.000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	4 Laporan	880.907.500,00	414.157.500,00		
6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase Luasan Tanam HPT	5,65%	83.500.000,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase Luasan Tanam HPT	5,65%	172.586.900,00	89.086.900,00		
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	268.276 Ton	83.500.000,00	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	268.276 Ton	172.586.900,00	89.086.900,00		
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	71,43%	6.330.000.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik	71,43%	117.576.800,00	-6.212.423.200,00		
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia	34 Unit	6.330.000.000,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia	34 Unit	117.576.800,00	-6.212.423.200,00		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	900.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	0,00	-900.000.000,00		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	3.200.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	0,00	-3.200.000.000,00		
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	420.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	-320.000.000,00		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.810.000.000,00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	17.576.800,00	-1.792.423.200,00		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Ternak Ruminansia yang Terlayani	12,70%	1.479.025.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Ternak Ruminansia yang Terlayani	12,70%	797.283.400,00	-681.741.600,00		
		Prosentase Ternak Unggas yang Terlayani	2,15%			Prosentase Ternak Unggas yang Terlayani	2,15%				
		Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	100%			Prosentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Penyakit	100%				
		Prosentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	7,149%			Prosentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH	7,149%				
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ternak yang Ditangani	33,00%	30.000.000,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ternak yang Ditangani	33,00%	24.475.400,00	-5.524.600,00		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	27 Laporan	30.000.000,00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	27 Laporan	24.475.400,00	-5.524.600,00		
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Keluar Masuk Ternak yang Dikeluarkan	110 Surat	10.000.000,00	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi Keluar Masuk Ternak yang Dikeluarkan	110 Surat	5.694.500,00	-4.305.500,00		
		Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang Dikeluarkan	660 Surat			Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang Dikeluarkan	660 Surat				
		Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan yang Dikeluarkan	225 Surat			Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan yang Dikeluarkan	225 Surat				
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	10.000.000,00	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	5.694.500,00	-4.305.500,00		
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dilaksanakan	61,00%	1.344.025.000,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dilaksanakan	61,00%	670.322.400,00	-673.702.600,00		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	6 Laporan	10.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	6 Laporan	7.189.800,00	-2.810.200,00		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	1.334.025.000,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	663.132.600,00	-670.892.400,00		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina dan Diawasi	19,50%	85.000.000,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina dan Diawasi	19,50%	91.715.200,00	6.715.200,00		
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	10.000.000,00	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	7.070.400,00	-2.929.600,00		
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina Untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	1 Unit Usaha	40.000.000,00	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina Untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	1 Unit Usaha	35.216.500,00	-4.783.500,00		
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	50 Orang	35.000.000,00	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	50 Orang	49.428.300,00	14.428.300,00		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan	10,40%	10.000.000,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan	10,40%	5.075.900,00	-4.924.100,00		
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Unit	10.000.000,00	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Unit	5.075.900,00	-4.924.100,00		
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Ternak Betina Peserta AUTSK	14,50%	10.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Ternak Betina Peserta AUTSK	14,50%	18.320.000,00	8.320.000,00		
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Peserta AUTSK	1.000 Ekor	10.000.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Peserta AUTSK	1.000 Ekor	18.320.000,00	8.320.000,00		
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 Laporan	10.000.000,00	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 Laporan	18.320.000,00	8.320.000,00		
VI	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Legalitas Usaha Peternakan	0,0454%	20.000.000,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Legalitas Usaha Peternakan	0,0454%	21.532.700,00	1.532.700,00		
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Budidaya yang Terdata	485 Peternak	10.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Budidaya yang Terdata	485 Peternak	12.270.000,00	2.270.000,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	10.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	12.270.000,00	2.270.000,00		
2	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan	6 Surat	10.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan	6 Surat	9.262.700,00	-737.300,00		
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	10.000.000,00	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	9.262.700,00	-737.300,00		
VII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	3,16%	100.000.000,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	3,16%	207.099.000,00	107.099.000,00		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET DAN SATUAN	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Ternak yang Meningkat Kelasnya	2 Kelompok	100.000.000,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Ternak yang Meningkat Kelasnya	2 Kelompok	207.099.000,00	107.099.000,00		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	10.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	16.960.000,00	6.960.000,00		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	70.000.000,00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	96.800.000,00	26.800.000,00		
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	20.000.000,00	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	93.339.000,00	73.339.000,00		
	TOTAL			17.127.196.998,00				12.185.438.925,16	-4.941.758.072,84		



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam Pengambilan Keputusan dan Penyusunan Rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan Manajemen dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, sehingga akan diperoleh Peningkatan Kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu Menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai Implementasi Pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana



Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Pencapaian Visi, dan Misi Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan Kaidah-kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja Perubahan dan dokumen pelaksanaan anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.